

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Abdul Khadir *Penerapan Restorative Justice (Studi Komparasi Fungsi Jaksa Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2023.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta 2020.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008.
- Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana – Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Laduni Alifatama, Lampung 2021
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada, Jakarta 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005
- Luhut MP Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London 2007.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, Jakarta, 2008
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2016.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2009.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, 1986.

Sri Marsita, Sri Humana, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

B. Artikel/Jurnal

Anggieta, Yohana, Herry Liyus, and Nys Arfa. “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 95–108. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>. Hlm. 95.

Andi Najemi dan Wendi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.24, Diakses dari <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>.

Arsul Sani, *Proyeksi Legislasi : Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Hukum Online, 2 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/proyeksi-legislasi--keadilan-restoratif-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia-lt63623cd807ef1/#>.

Budi Suhariyanto, “*Restorative justice* dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 432. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>

Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Pampas Journal Criminal Of Law*, Vol.1 No.2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

- Eko Syaputra, “Penerapan Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei 2021, hlm 243.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1209/511..>
- Diana Suhardiman and Petter Mollinga "Institutionalised Corruption in Indonesia irrigation: An analysis of the upeti system, *Development Policy Review*, March 2016, [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1467-7679/issues](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-7679/issues)
- El Firsta Nopsiamti AR, Dessy Rakhmawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama” *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 185, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>
- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadia, Pujiyono, “Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10 No. 1, Februari 2021, hlm 160. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/8088/pdf>.
- Hafrida, “Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid. B/Tpk/2012/Pn. Jbi”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2, 2013, hlm.32, Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2116> ,
- Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *UBELAJ Jurnal*, Volume 3, Issue 2, 2018, hlm. 2. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/6899>
- Irvan Maulana & Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi *Restorative justice* di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021. hlm 49-50. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734/691>.
- Kanti Pertiwi, “Democracy is the cure? : Evolving Construction of Corruption in Indonesia 1994, 2014, Springer Nature B.V. 2020, *Journal of Bussines Ethics*, <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04560-y>
- Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 245, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/6822/pdf>

Putu Ariesta Wiryawan Made Tjatrayasa, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm.3, Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/19138>

Puteri Hikmawati, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?),” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (September 2019): 100–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

Rida Isra Sitepu, Rudi Hermawan, “Pendekatan *Restorative justice* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 3, 2019, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/44>

Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, “Implementasi *Restorative justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vo 1, No1, 2019, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7>

Rien Agustin F and Dewi Susilowati, “Mencegah Korupsi Dengan Blockchain Teknologi (Studi Kasus Masyarakat Indonesia Pengadaan)” 8, no. September (2019). <http://www.ijstr.org/final-print/sep2019/Preventing-Corruption-With-Blockchain-Technology-case-Study-Of-Indonesian-Public-Procurement-.pdf>

Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol 8, No. 2, 2021, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/301>

Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 5, 2011, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>

Sahuri Lasmadi, “*Restorative justice* As An Alternative For The Settlement Of Corruption Crimes That Adverse State Finances In The Perspective Of The Purpose Of Conviction,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Issue 2 (Juni 2021): hlm 296, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/904>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran RI Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption* 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157)

Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 Perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan tindak pidana korupsi

Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 pada tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap penyelidikan.

D. WEBSITE

IrfanKamil, ICW Ada 553 Kasus Korupsi dengan Kerugian Rp29,4 T di 2021 ([ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun \(kompas.com\)](#))

Siwalimanews, “Jaksa Ngotot Tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora” (Ambon, 2020), [Jaksa Ngotot tak Lanjutkan Kasus Tugu Trikora - Siwalima \(siwalimanews.com\)](#)

Zedanya Aprilia, *DPR pertanyakan kemana sisa kerugian Jiwasraya*, CNBC Indonesia, [DPR Pertanyakan Kemana Sisa Kerugian Jiwasraya Rp 10 T? \(cnbcindonesia.com\)](http://cnbcindonesia.com),

E. SKRIPSI

Rizki Dwi Nugroho, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) Tahun 2021, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56652/1/RI ZKI%20DWI%20NUGROHO%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56652/1/RI%20DWI%20NUGROHO%20-%20FSH.pdf)

Yogi Yudistira, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi yang Relatif Kecil Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-1113/F/FD.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, (Universitas Bangka Belitung), Tahun 2022. <http://repository.ubb.ac.id/3256/>

Wahyu Danang Subiantoro, “Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari *Restorative justice*” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), Tahun 2022, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/147>